

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN
BUMD, DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

ACHMAD BIMASYA PUTRA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

EFFECT OF LOCAL TAXES, LEVIES, ENTERPRISES REVENUE, AND OTHERS PAD VALID ON ECONOMIC GROWTH IN LOCAL GOVERNMENT DISTRICT / CITY IN THE PROVINCE OF LAMPUNG

By:

ACHMAD BIMASYA PUTRA

Economic growth is used as a benchmark of a region to see an increase in development. With the increasing economic growth, local governments are required to enhance and improve existing infrastructure to support economic activities and it is budgeted in the form of capital expenditure. The purpose of this study was to determine whether the local taxes, levies, revenues of enterprises, and other legitimate PAD effect on economic growth in the local government district / city.

The study sample as many as 15 local government districts / cities in Lampung Province during the period 2010-2014. The results of this study explains that local taxes affect the economy petumbuhan with a significance level of 0.041. The greater the local taxes that local governments obtained it will affect economic growth in the next period. Meanwhile, levies, income enterprises, other legitimate PAD have no effect on economic growth with a significance level of 0.727. This suggests that the increased levies, revenues of enterprises, and other legitimate PAD, it will not affect the economic growth of the local government.

keywords: local taxes, levies, enterprises revenue, others pad valid, economic growth.

ABSTRAK

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN BUMD, DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

ACHMAD BIMASYA PUTRA

Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai tolak ukur suatu daerah dalam melihat peningkatan pembangunan. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur yang ada untuk menunjang kegiatan perekonomian dan hal tersebut dianggarkan dalam bentuk belanja modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sampel penelitian ini sebanyak 15 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2010-2014. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat signifikansi 0,041. Semakin besar pajak daerah yang didapat pemerintah daerah maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada periode selanjutnya. Sedangkan, retribusi daerah, pendapatan BUMD, lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat signifikansi 0,727. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya retribusi daerah, pendapatan BUMD, dan lain-lain PAD yang sah, maka tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu pemerintah daerah.

Kata Kunci : Pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD, lain-lain PAD yang sah, pertumbuhan ekonomi.

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN
BUMD, DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

ACHMAD BIMASYA PUTRA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2017**

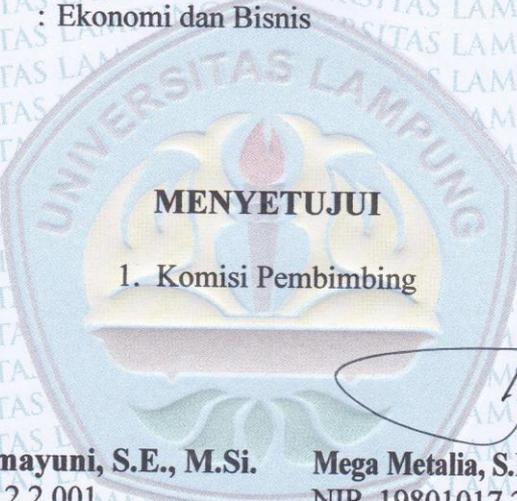
Judul Skripsi : **PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN BUMD, DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Achmad Bimasya Putra**

No. Pokok Mahasiswa : 1211031001

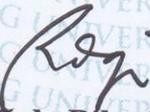
Jurusan : Akuntansi

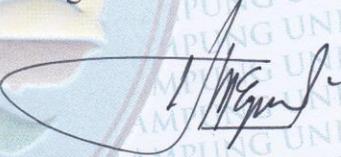
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



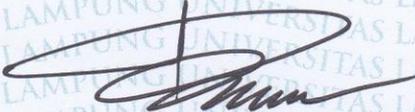
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

 **Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**
NIP 19750620 200012 2 001

 **Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Akt.**
NIP 19801017 200501 2 002

2. Ketua Jurusan Akuntansi

 **Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**
NIP 19620612 199010 2 001

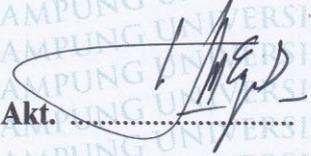
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.



Sekretaris : Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Akt.

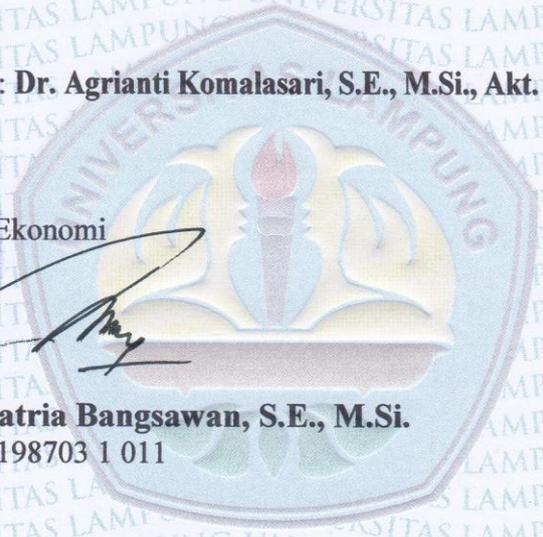


Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.



2. Dekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Maret 2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Achmad Bimasya Putra

NPM : 1211031001

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan BUMD, dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung” telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan hasil karya orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lainnya. Sepanjang sepengetahuan saya, skripsi ini belum pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali yang diacu secara tertulis dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2017



Achmad Bimasya Putra

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 29 September 1993 sebagai putra keempat dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan Irsan Rianto dan Marvinia.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di SD Negeri 2 Rawa Laut, Bandar Lampung dan lulus Tahun 2006. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Kartika II-2 (Persit) yang diselesaikan pada Tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan tingkat atas di SMA Negeri 10 Bandar Lampung hingga lulus pada Tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2012 melalui jalur Ujian Tertulis dan sampai berhasil lulus ujian komprehensif tanggal 17 Maret 2017. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam UKMF HIMAKTA (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) sebagai anggota pada periode 2012-2013.

MOTTO

*Belajarlah, sebab tak ada manusia yang lahir dalam keadaan
pandai, dan orang berilmu tidak sama dengan orang bodoh*
(Hikmah)

*Life is like riding a bicycle. To keep your balance , you must keep
moving*
(Albert Einstein)

*Before getting frustrated at a situation, remember that you never
know what Allah has placed goodness in*
(Khadimul Qur'an)

PERSEMBAHAN

العَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT ,atas rahmat dan hidayahnya, aku persembahkan sebuah karya nan kecil ini kepada :

Kedua orang tua tercinta Papa Irsan Rianto dan Mama Marvinia ,
terimakasih atas seluruh kasih sayang, dukungan serta doa yang selalu menyertai setiap langkahku demi mencapai keberhasilan dan kesuksesanku

Kakak-kakakku tersayang dan seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakanku serta memberi bantuan dalam segala hal dalam menggapai cita-cita

Teman-teman dan sahabatku, terimakasih atas kebersamaan dan kesetiaannya selama ini

Serta Almamaterku Universitas Lampung
Khususnya keluarga besar Jurusan Akuntansi yang telah menjadi tempat menimba ilmu untuk dapat meraih cita-cita ku dalam menuju kesuksesan

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan semua ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan BUMD, dan Lain-lain PAD yang sah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, masukan, arahan dan nasihat serta perhatian yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi.

5. Ibu Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Akt. sebagai Dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan saran-sarannya selama proses penyelesaian skripsi
6. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji, atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Akuntansi atas semua bimbingan, pengajaran, pelayanan, dan bantuan yang telah diberikan.
9. Kedua orang tuaku tercinta Papa Irsan Rianto dan Mama Marvinia terima kasih atas seluruh limpahan kasih sayang, doa yang tiada henti demi keberhasilan putri bungsunya, dukungan serta motivasi yang selalu diberikan untukku. Atas izin Allah SWT insya allah akan aku balas seluruh kasih sayang dan budi baik kalian.
10. Kakak- kakaku: Putri Mayang Sari, Muhammad Chardinal, Alana Arum Sari dan adikku Savira Ramadhani terima kasih selalu memberi dukungan dan doa dalam kelancaran proses kuliah dan penyelesaian skripsi ini.
11. Untuk keponakanku tersayang: Wira Ardana, Mikail Abgary dan Nayyara Calita yang selalu membuat Abi bahagia karena tingkah kalian yang sangat lucu dan menggemaskan.

12. Terima kasih untuk teman spesialku dari SMA Ayu Aisyah Desyriani yang selalu meluangkan waktu untukku selama ini, menemaniku kemana-mana, selalu membantu saat aku butuh bantuan, memberikan semangat disaat aku terpuruk, dan menjadi pendengar curahan hati setia aku disaat aku sedang sedih dan senang.
13. Untuk sahabatku: Febri Romadhon, Hadi Rachman, Syarip Hidayat, Febrian Ahmad, Ray Sumitro, Dini Gunawan, Agung Bagus Ksatria, Fakhrol Arifin, Naufal Graisman, Rachmad Mahendra yang selalu memotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan.
14. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2012: M. Ferly Herdiansyah, Ray Sumitro, Hadi Rahman, Ferryansyah, Hanief, M. Pandu Solihin, Fakhrol Arifin, Naufal Graisman, Fatur Rahman, Selverico Sutanto, Dini Gunawan, Aziz Sasmita, Dwi Sutrisno, Citra Janiencia, Elvi Riali, Widya Maulin Annisa, Dian Kusuma Dewi, Susi Bagus Zamartha, As Shaumi Gahara, Priska Wahyurininta, Trida Himma Zevita, Rossinda Budianti, Rizky Zakiyah, Muthia Prima Nirmala, Elia Rahma Putri, Puji Kurnia Putri, Nurul Qomariyah, Nur Adila, Evi Krismayanti, Sri Wahyuni, Mia Meisiska, Liana, Eva, Tara Marselina, Indah, Yuni Pratiwi, Yunita, Umi Kalsum, Firda, Adelia Ghasani, dan semuanya, terima kasih telah bersama-sama berjuang di bangku perkuliahan.
15. Seluruh teman Akuntansi 2012 ganji dan genap yang tidak bisa disebutkan satu-persatu kalian semua luar biasa.

Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin skripsi ini masih jauh dari sempurna dan untuk itu mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga skripsi ini bermanfaat dikemudian hari.

Bandar Lampung, April 2017

Penulis

Achmad Bimasya Putra

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan dan Batasan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	6
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	7
2.1.3 Pajak Daerah.....	9
2.1.4 Retribusi Daerah.....	11
2.1.5 Pendapatan BUMD.....	14
2.1.6 Lain-lain PAD yang Sah.....	15
2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	17
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	19

III. METODE PENELITIAN

3.1	Populasi dan Sampel.....	25
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	26
3.3	Variabel Penelitian.....	26
3.3.1	Variabel Dependen.....	26
3.3.2	Variabel Independen.....	27
3.4	Analisis Data.....	28
3.4.1	Statistik Deskriptif.....	28
3.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	29
a.	Uji Normalitas.....	29
b.	Uji Autokorelasi.....	30
c.	Uji Multikolinieritas.....	30
d.	Uji Heteroskedastisitas.....	31
3.4.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	31
3.4.4	Pengujian Hipotesis.....	32
a.	Koefisien Determinasi.....	32
b.	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	33
c.	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	33

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Analisis Data.....	35
4.2	Statistik Deskriptif.....	36
4.3	Pengujian Asumsi Klasik.....	38
4.3.1	Uji Normalitas.....	38
4.3.2	Uji Autokorelasi.....	41
4.3.3	Uji Multikolinieritas.....	42
4.3.4	Uji Heteroskedastisitas.....	43
4.4	Pengujian Hipotesis.....	44
4.4.1	Koefisien Determinasi.....	44
4.4.2	Uji Statistik F.....	45
4.4.3	Uji Hipotesis (Uji Statistik t).....	46

4.5	Pembahasan.....	47
4.5.1	Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi...	47
4.5.2	Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	48
4.5.3	Pengaruh Pendapatan BUMD terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	49
4.5.4	Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	51

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	54
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	55
5.3	Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Anggaran dan Realisasi PAD Provinsi Lampung.....	3
Tabel 3.1	Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	26
Tabel 3.2	Pengukuran Autokorelasi <i>Durbin-Watson (DW-Test)</i>	31
Tabel 4.1	Kriteria Sampel.....	36
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif.....	38
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	41
Tabel 4.4	Hasil Uji Autokorelasi Model Regresi.....	42
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinieritas Model Regresi.....	43
Tabel 4.6	Uji Glejser Model Regresi.....	44
Tabel 4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Regresi.....	45
Tabel 4.8	Hasil Uji F Model Regresi.....	46
Tabel 4.9	Hasil Uji t Model Regresi.....	47
Tabel 4.10	Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Penelitian.....	20
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Model Regresi (Grafik Histogram).....	40
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Model Regresi (Grafik P-P Plot).....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Sampel Penelitian
Lampiran II	Data Observasi dan Variabel Penelitian
Lampiran III	Statistik Deskriptif
Lampiran IV	Uji Normalitas
Lampiran V	Uji Autokorelasi
Lampiran VI	Uji Multikolinieritas
Lampiran VII	Uji Heterokedastisitas
Lampiran VIII	Koefisien Determinasi
Lampiran IX	Uji Statistik F
Lampiran X	Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan paling penting dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah yang komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lainnya. Otonomi Daerah merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang menyatakan bahwa, “Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2009).

Menurut Mardiasmo, (2011) : “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai tolak ukur suatu daerah dalam melihat peningkatan pembangunan. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur yang ada untuk menunjang kegiatan perekonomian dan hal tersebut dianggarkan dalam bentuk belanja modal. Belanja modal sendiri terdiri dalam beberapa komponen seperti belanja tanah, gedung, bangunan, irigasi, jaringan, dan lainnya.

Hal-hal tersebut lah yang dirasa menunjang daerah untuk meningkatkan kegiatan dan akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat serta pendapatan daerah akan mengalami kenaikan.

Provinsi Lampung merupakan daerah pemerintahan yang berada di ujung Pulau Sumatera yang dipimpin oleh seorang gubernur dengan pusat pemerintahan yang dibagi menjadi 13 kabupaten dan 2 kota. Berikut akan disajikan tabel yang akan menggambarkan total perolehan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung yaitu selama Tahun 2010-2014.

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2010-2014

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2010	1.020.250.461.479,00	1.118.340.908.205,95	109,61
2011	1.271.960.066.926,50	1.376.418.352.350,29	108,21
2012	1.874.304.393.900,78	1.666.717.331.753,00	88,92
2013	2.183.413.478.756,32	1.771.297.934.878,73	81,13
2014	2.258.133.103.022,13	2.274.685.572.912,86	100,73

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, data diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2010 sampai 2014. Total perolehan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, pendapatan BUMD dan pendapatan lain daerah secara keseluruhan terus mengalami peningkatan penerimaan terbesar dari sektor pajak dan retribusi daerah. Setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 2014 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan. Target pendapatan asli daerah pada Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar sebesar

77,8% dimana pada tahun 2013 target pendapatan asli daerah sebesar Rp 1.771.297.934.878,73 dan untuk tahun 2014 naik menjadi Rp 2.274.685.572.912,86. Selama tahun 2010-2014 Provinsi Lampung dengan total perolehan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2010 sebesar Rp 1.118.340.908.205,95 hingga 2014 sebesar Rp 2.274.685.572.912,86. Total perolehan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi, pendapatan BUMD dan pendapatan lain daerah.

Dalam penelitian Ernawati (2009) di kota Malang, mengungkapkan bahwa Kota Malang mengindikasikan terdapat pengaruh yang positif antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan Zulyanto (2010) mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD, dan pendapatan lain- lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan BUMD Dan Pendapatan Lain Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2010-2014”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2010-2014.
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2010-2014.
3. Apakah pendapatan BUMD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2010-2014.
4. Apakah pendapatan lain daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2010-2014.

1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2010-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2010-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2010-2014.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tahun 2010-2014.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Lane dalam Halim dan Abdullah (2008) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Lane menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hubungan keagenan dalam organisasi sektor publik terbagi ke dalam beberapa hal yaitu: hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah, hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif kemudian antara legislatif dengan publik dan hubungan keagenan dalam pemanfaatan anggaran daerah.

Hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah terjadi pada saat penyusunan APBD. Dalam sudut pandang teori keagenan, hal ini merupakan sebuah bentuk kontrak, yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Halim dan Abdullah (2008) menyatakan bahwa dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agent dan legislatif adalah principal. Hubungan keagenan antara legislatif dan publik, legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal. Hagen (2007) berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih

dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik yang merupakan hubungan keagenan dalam pemanfaatan anggaran daerah.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo,2011:1). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Dalam pasal 79 UU 22/1999 mengisyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, kepala daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, diharapkan kepada kepala daerah Kabupaten/Kota didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus menerus selalu menggantungkan dana (anggaran) dari pusat melalui pembagian dana perimbangan. Dalam administrasi keuangan daerah PAD adalah pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksud sebagai sumber PAD guna pembangunan.

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 79 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 UU 22/1999 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: “pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.”

2.1.3 Pajak Daerah

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Suandy, 2011).

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).

Menurut Davey (2012) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagikan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Saragih (2007:61), yang dimaksud

dengan pajak daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.” Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2006:77) antara lain ialah:

1. Pajak hotel,
2. Pajak restoran,
3. Pajak hiburan,
4. Pajak reklame,
5. Pajak penerangan jalan,
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
7. Pajak parkir.

Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
2. Alat pengatur (*regulatory*)

Dalam memungut Pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan yaitu (Mardiasmo, 2010):

1. *Official Assessment System* , adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak.

2.1.4 Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan retribusi menurut Saragih (2008:65) adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Menurut Halim (2011:67), “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.”Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3

golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a). Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah:

- 1) Retribusi layanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum
- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 10) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus
- 11) Retribusi pengelolaan limbah cair
- 12) Retribusi pelayanan tera/ tera ulang
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

b). Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa usaha yakni:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir/pertokoan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir
- 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggeraan/villa
- 7) Retribusi rumah potong hewan
- 8) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- 10) Retribusi penyeberangan air
- 11) Retribusi Penjualan produksi usaha daerah

c). Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarannya atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi perizinan tertentu yakni:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek
- 5) Retribusi izin usaha perikanan

2.1.5 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan (Pendapatan dari BUMD)

Menurut Halim (2009) “Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.”

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititik beratkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. Penjelasan atas UU berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada *profit*, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjainin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan

yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan. (Riwu, 2007).

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Bagian laba perusahaan milik daerah
2. Bagian laba lembaga keuangan bank
3. Bagian laba lembaga keuangan non bank
4. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

2.1.6 Lain-Lain PAD yang Sah

UU No.33 tahun 2004 menjelaskan tentang pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim (2011), "Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah."

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Penerimaan jasa giro
3. Penerimaan bunga deposito
4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah

Halim (2011) membedakan 2 (dua) faktor yang memengaruhi pendapatan asli daerah suatu daerah, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan faktor internal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan.

2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Menurut Sukirno (2006) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat. Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2009) pada Kota Malang mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Malang.

Amiel et al., (2010) melakukan penelitian yang sama tentang pajak, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat memperoleh hasil bahwa besarnya pajak dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat selama tahun 1990-2010. Penelitian lain yang dilakukan oleh Davoodi dan Zou (1998) menunjukkan hasil yang berbeda mengenai alokasi sumberdaya fiskal yang dilakukan serentak di 46 negara berkembang, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara alokasi sumber daya fiskal yang terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak, retribusi, pendapatan BUMD, pendapatan lain-lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di 46 negara berkembang.

Penelitian yang dilakukan Zulyanto (2010) mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan bumd, dan pendapatan lain- lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.

Namun hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Adi dan Ekaristi (2009) mengindikasikan bahwa banyak daerah otonom yang tidak memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan demikian, banyak daerah yang tergantung pada Dana Alokasi Umum yang berasal dari pemerintah pusat yang menyebabkan fenomena ilusi fiskal dalam kinerja anggaran pemerintah sehingga pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak, Retribusi, Pendapatan BUMD dan Pendapatan Lain Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

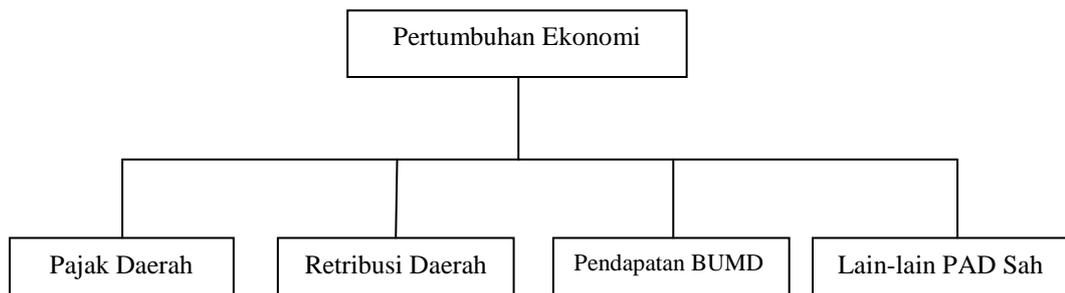
Penelitian yang dilakukan Setiaji dan Adi (2007), Susilo dan Adi (2007) mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki sehingga menyebabkan tidak adanya peningkatan peran PAD yang

signifikan seharusnya kontribusi PAD dapat menimbulkan kemandirian daerah serta pertumbuhan ekonomi dan bukan sebaliknya daerah semakin tergantung pada Dana Perimbangan pemerintah pusat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Kerangka Pemikiran Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan BUMD Dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2010-2014.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi jumlah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lainnya maka semakin tinggi pula PDRB suatu daerah dan dapat dikatakan bahwa semakin makmur dan sejahtera suatu daerah tersebut. Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekonomian di suatu negara. Dijelaskan bahwa tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi yang otomatis menekan pertumbuhan ekonomi dan berdampak mengecilnya penerimaan pajak. Tarif pajak yang relatif kecil akan berdampak sebaliknya,

investasi melaju, pertumbuhan ekonomi membaik, dan penerimaan negara membesar. Jadi, jelas setiap kebijakan perpajakan memiliki dampak ekonomi makro dan aspek sosial lainnya.(Halim, 2007).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2009) mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Amiel et al., (2010) melakukan penelitian yang sama tentang pajak, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan PDRB ekonomi di Amerika Serikat memperoleh hasil bahwa besarnya pajak dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat selama tahun 1990-2010.

Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Dan dalam penelitian ini memprediksi bahwa terdapat pengaruh yang positif pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₁: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

2.4.2 Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana yang dimaksudkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Saragih, 2008).

Bahl (2008) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh penerimaan dari dalam daerah, karena dengan kemampuan memperoleh penerimaan dari dalam daerah ini, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Dimana penerimaan daerah ini memiliki dampak positif, tetapi khususnya hanya untuk retribusi daerah. Retribusi daerah akan memiliki dampak positif jika penerimaan retribusi digunakan oleh pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran public sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2009) mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun penelitian yang juga dilakukan oleh Zhang dan Zou (1997) telah menunjukkan hasil bahwa alokasi sumber daya fiskal yang terdiri dari retribusi daerah telah menunjukkan hasil yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara retribusi daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini juga memprediksi bahwa terdapat pengaruh yang positif retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₂: Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

2.4.3 Pendapatan BUMD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan BUMD merupakan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan (Halim, 2009). Tujuan didirikan BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. BUMD juga merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, penjualan saham milik daerah. Pendapatan BUMD akan meningkatkan sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi satu daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulyanto (2010) mengindikasikan bahwa bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendapatan BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Namun penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1997) tentang pertumbuhan ekonomi di Cina menunjukkan hasil bagaimana alokasi sumber daya fiskal yaitu pendapatan BUMD memperoleh hasil yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan BUMD dengan pertumbuhan ekonomi dan penelitian ini memprediksi bahwa terdapat pengaruh yang positif pendapatan BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₃: Pendapatan BUMD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

2.4.4 Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Lain-lain PAD yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah (Halim, 2009). Lain-lain PAD yang sah adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun.

Penelitian yang dilakukan Zulyanto (2010) mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal yaitu pendapatan lain-lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Namun penelitian serupa yang dilakukan Davoodi dan Zou (1998) menunjukkan hasil yang berbeda mengenai alokasi sumber daya fiskal yang dilakukan serentak di 46 negara berkembang, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara alokasi sumber daya fiskal yang terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah salah satunya yaitu pendapatan lain-lain daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di 46 negara berkembang. Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan lain daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

H₄: Lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi, menurut Indriantoro dan Supomo (2008) adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk tahun anggaran 2010-2014.

Tabel 3.1

Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2010-2014 yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian

No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Lampung Barat
2	Kab. Lampung Selatan
3	Kab. Lampung Tengah
4	Kab. Lampung Timur
5	Kab. Lampung Utara
6	Kab. Mesuji
7	Kab. Pesawaran
8	Kab. Pringsewu
9	Kab. Tanggamus
10	Kab. Tulang Bawang
11	Kab. Tulang Bawang Barat
12	Kab. Way Kanan
13	Kab. Pesisir Barat
14	Kota Bandar Lampung
15	Kota Metro

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 meliputi data: pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan lain-lain PAD yang sah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung. Jenis dari Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementrian Keuangan Republik Indonesia atau dari masing-masing situs resmi disetiap kabupaten/kota serta data pertumbuhan ekonomi di *website* Badan Pusat Statistik (BPS).

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang bergantung atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang bebas. Menurut Indriantoro dan Supomo (2008), variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel yang diduga sebagai akibat dari variabel independen. Pertumbuhan ekonomi (Y) menjadi variabel dependen. Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi daerah diprosikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yaitu totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi

suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara riil di suatu daerah dengan mengabaikan laju inflasi (Kuncoro, 2010).

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}}$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya/terpengaruhnya variabel dependen. Dalam hal ini pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD, dan pendapatan lain daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD, dan lain-lain PAD yang sah menjadi variabel independen.

a. Pajak Daerah (X_1)

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dengan paksaan atas dasar undang-undang. Pembayaran pajaknya tidak ada kontraprestasi secara langsung dipungut secara langsung dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah total penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 (Halim, 2011).

b. Retribusi Daerah (X_2)

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah total penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Halim, 2011).

c. Pendapatan BUMD (X_3)

Pendapatan BUMD adalah Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pendapatan BUMD yang digunakan dalam penelitian ini adalah total penerimaan pendapatan BUMD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Halim, 2010).

d. Lain-lain PAD yang sah (X_4)

Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan yang merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah. Lain-lain PAD yang sah dalam penelitian ini adalah total seluruh penerimaan pendapatan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 (Halim, 2010).

3.4. Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data sehingga dapat memberikan suatu informasi

berdasarkan keadaan umum (Kadafi, 2013). Selain itu, statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi mengenai variabel independen dan dependen yang di jabarkan dalam bentuk statistik (Ghozali, 2013).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji data-data dengan menggunakan regresi liner berganda. Pengujian statistik yang menggunakan analisis regresi dapat dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut yaitu data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013).

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik histogram dan *normal probability plot* dimana dilakukan pebandingan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dalam uji normalitas ini dilakukan pula *One-Sample Kolmogorov Smirnov* dengan tingkat signifikansi 0,05.

Dasar pengambilan keputusan:

1. Bila *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka data berdistribusi normal.
2. Bila *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam suatu model regresi maka dalam penelitian ini digunakan *Durbin Watson Test (DW-Test)* dengan ketentuan $dU \leq DW \leq 4-dU$ (Ghozali, 2013).

Tabel 3.2
Pengukuran Autokorelasi *Durbin-Watson (DW-Test)*

Nilai d	Keterangan	Keputusan
$0 < DW < dL$	Tidak Ada Autokorelasi Positif	Tolak
$dL \leq DW \leq dU$	Tidak Ada Autokorelasi Positif	Tanpa Keputusan
$4 - dL < DW < 4$	Tidak Ada Korelasi Negatif	Tolak
$4 - dU \leq DW \leq 4 - dL$	Tidak Ada Korelasi Negatif	Tanpa Keputusan
$dU < DW < 4 - dU$	Tidak Ada Autokorelasi, Positif atau Negatif	Tidak Ditolak

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Pengujian ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai *VIF* > 10 (Ghozali, 2013:107).

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan melalui pengamatan pola pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent) dengan residualnya. Model regresi dikatakan heteroskedastisitas ketika titik-titik data pada grafik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2013:139).

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis linier berganda, dimana analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Penggunaan regresi linier berganda untuk mengukur seberapa besar hubungan variabel independen dan variabel dependen sehingga dapat membedakan kedua variabel dalam penelitian (Ghozali, 2013).

$$\text{PDRB} = \beta_0 + \beta_1\text{PD} + \beta_2\text{RD} + \beta_3\text{BUMD} + \beta_4\text{PLD} + \epsilon$$

Keterangan:

PDRB	: Laju Pertumbuhan Ekonomi
PD	: Pajak Daerah
RD	: Retribusi Daerah
BUMD	: Pendapatan BUMD
PLD	: Pendapatan lain-lain daerah yang sah
$\beta_0 - \beta_1$: Koefisien yang diestimasi
ϵ	: Standar error

3.4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan alat statistik SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 21.0. Dalam menguji hipotesis dilakukan untuk menyatakan hubungan antar variabel dependen, yaitu Y (pertumbuhan ekonomi) dengan variabel independen, yaitu X (pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD, pendapatan lain-lain daerah yang sah).

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian (Ghozali, 2013:97) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai R^2 , maka semakin terbatas kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Penelitian ini juga menggunakan *Adjusted R Square* ($\text{Adj } R^2$) karena terdapat lebih dari satu variabel independen dan apabila hanya ada satu variabel independen maka menggunakan *R Square* (R^2) dalam menjelaskan pengaruh variabel independennya .

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

F-test digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal. F-test juga digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013:98). Kriteria pengujiannya (Uji-F) adalah seperti berikut ini:

1. H_a ditolak yaitu apabila value > 0.05 atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian.
2. H_a diterima yaitu apabila value = 0.05 atau bila nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan nilai α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian signifikansi parameter individual (Ghozali, 2013:98) ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Kriteria pengujian hipotesis adalah seperti berikut ini:

1. H_a ditolak, yaitu apabila value > 0.05 atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai α 0,05 berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. H_a diterima, yaitu apabila value = 0.05 atau bila nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan nilai α 0,05 berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010-2014 di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar pajak daerah yang didapat pemerintah daerah maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada periode selanjutnya.
2. Variabel penerimaan retribusi daerah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung secara negatif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar retribusi daerah yang didapat pemerintah daerah maka tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada periode selanjutnya.
3. Variabel pendapatan BUMD secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya

pendapatan BUMD, maka tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada periode selanjutnya.

4. Variabel lain-lain PAD yang sah secara positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya lain-lain PAD yang sah, maka tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data jangka waktu enam tahun yang diperoleh dari situs penyedia data, tidak berasal dari pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang diteliti secara langsung.
2. Penelitian ini hanya menggunakan empat faktor dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkatkan hasil yang lebih signifikan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan pada penelitian ini, ada beberapa saran-saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel independen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. Contohnya:

dana perimbangan, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana khusus alokasi khusus.

2. Diharapkan Pemerintah Daerah Se-Kota Di Provinsi Lampung di harapkan dapat lebih meningkatkan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah dengan optimal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
3. Masyarakat di Provinsi Lampung di harapkan dapat mengawasi jalannya pembangunan di daerah tersebut guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari dan Puspa Dewi Ekaristi. 2009. Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Volume 6-Nomer 1, Juni 2009.
- Amiel, Lindsay., Deller, Steven., dan Stallman., Judith. 2012. *Economic Growth And Tax And Expenditure Limitations. Journal of Southren Regional Science Association.* 42, 185-206.
- Bank Indonesia. Kajian Ekonomi Regional.2013 Barry W. *Poulson and Jules Gordon Kaplan, State Income Taxes and Economic*
- Ghozali, Imam, 2005. Aplikasi dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Growth., Cato Journal, Vol. 28, No. 1 (Winter 2008). Davoodi, Hamid dan Heng-fu Zou. 1998. *Fiscal Decentralization and Economic*
- Gujarati, Damodar N. 1995. Basic Econometrika. Third Edition. McGrawHill Companies, Inc. New York.
- Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Jhingan, ML., 2004. Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kadmatmiko, 2002. Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka
- Kuncoro, 2004. Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada.
- Mankiw, N. Gregory, 2003. Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, 2004. Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2007 tentang otonomi daerah.

- Rustiadi, dkk, 2007. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Institut Pertanian Bogor.
- Salemba Empat, Jakarta. Trihendradi, C. 2011. *Langkah Mudah Melakukan Analisis Statistik*
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Saran, Cetakan Pertama, UII Press. Yogyakarta. Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta. Penertbit Andi
- Setiaji, Wiriawan dan Priyo Hari Adi. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Suandy, Early. 2008. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan; Problematika dan Pendekatan*.
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo Hari Adi. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (studi empiris di Provinsi Jawa Tengah)*. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.
- SPSS 19. Andi, Yogyakarta. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-undang nomor 34 tahun 2000 J.O undang-undang nomer 18 tahun 1997 tentang *pajak daerah dan retribusi daerah*
- Vazquez, M Jorge dan McNab M Robert, 2001. *Fiscal Desentralization & Economic Growth.*, Working Paper #01-1, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Woller, M Gary dan Phillips Kerk, 1998. *Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth; An Empirical Investagion.*, *The Journal of Developmnet Studies*; April 1998;34,4.
- Zhang, Tao dan Heng-fu Zou. 1997. *Fiscal Decentralization, Publik Spending, and Economic Growth In China*. *Journal of Public Economucs*. Washington DC.
- Zulyanto, Aan. 2010. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu*. Universitas Diponegoro.